

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sapi potong merupakan komoditas subsektor peternakan yang sangat potensial, hal ini dapat dilihat dari tingginya permintaan akan daging sapi. Namun sejauh ini Indonesia belum mampu menyuplai semua kebutuhan daging sapi tersebut. Populasi sapi potong dalam negeri pada tahun 2019 adalah mencapai 17.118.650 ekor, dari jumlah tersebut 428.103 ekor merupakan populasi ternak sapi potong yang ada di provinsi Sumatera Barat (Badan Pusat Statistik, 2019). Sementara itu Badan Pusat Statistik (BPS) juga menyebutkan bahwa kebutuhan daging sapi nasional pada tahun 2019 adalah sebesar 2,56 kilogram (kg) per kapita per tahun. Kondisi tersebut menuntut adanya impor daging untuk pemenuhan kebutuhan daging nasional.

Di pedesaan petani memanfaatkan berbagai jenis ternak yang digunakan sebagai usahatani antara lain untuk membajak lahan, transportasi hasil tani, dan sebagai penyedia pupuk untuk produksi tanaman semusim. Selain itu ternak juga berfungsi sebagai penyedia pangan (sumber protein) dan sebagai tabungan hidup. Masyarakat pedesaan banyak yang bermata pencaharian sebagai petani serta mempunyai usaha ternak seadanya seperti sapi dan kerbau yang dapat digunakan tenaganya untuk membajak sawah. Kondisi peternakan pun saat ini sebagian besar masih merupakan peternakan rakyat, dengan ciri-ciri diantaranya skala kepemilikan ternaknya yang relatif kecil atau sedikit berkisar 1-4 ekor ternak, penggunaan input teknologi dan inovasi yang relatif terbatas, serta mengandalkan kebutuhan pakan (Mauludin dkk., 2012). Dengan pemeliharaan yang lebih intensif dan dengan penggunaan teknologi, usaha ternak di pedesaan memiliki peluang

yang besar untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi tanpa harus bersaing dengan usaha tanaman pangan dalam penggunaan lahan (*not essentially land based*).

Pemerintah telah mengimplementasikan banyak program untuk meningkatkan populasi ternak di Indonesia salah satunya adalah sapi potong, namun untuk memenuhi kebutuhan daging nasional Indonesia masih tergantung pada impor. Sejak tahun 2000-an berbagai program digulirkan untuk mendukung kemandirian sapi potong. Namun demikian sampai tahun 2016 Indonesia masih harus impor untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri (Sodiq, 2011, Yuwono dan Sodiq, 2010, Hadi dan Ilham, 2002, Lisson *et al.*, 2011, Poppi *et al.*, 2011). Program bantuan permodalan pun telah banyak digulirkan kepada peternak kecil oleh pemerintah maupun swasta (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, 2010). Program bantuan pembiayaan yang dimaksud antara lain seperti program bantuan langsung masyarakat (BLM), sarjana membangun desa (SMD), program percepatan pencapaian swasembada daging (P2SD), dan kredit bersubsidi.

Kebijakan program bantuan ternak sapi yang telah dicanangkan oleh pemerintah kepada peternak atau kelompok ternak diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ternak atau daging sapi, mensejahterakan peternak sapi dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah. Dengan demikian penerima bantuan harus memiliki kesiapan yang memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, ada indikasi bahwa penerima bantuan hanya berupaya bagaimana bantuan bisa didapatkan. Disisi lain, ternak tidak dipelihara dengan baik sehingga sering menuai kegagalan. Pola pikir yang

cenderung ingin instan dikhawatirkan justru akan berisiko pada kegagalan dan keberhasilan program.

Selain itu, persepsi peternak juga berpengaruh terhadap baik buruknya program bantuan yang diterima. Pengaruh persepsi terhadap peternak yang mendapatkan bantuan sapi potong dari pemerintah diharapkan baik, karena semakin baik peternak mempersepsikan suatu bantuan sapi potong yang diberikan oleh pemerintah maka akan lebih baik pula manajemen, tata cara beternak sehingga mampu meningkatkan jumlah populasi ternak dari bantuan sapi potong yang diberikan, dan begitu juga sebaliknya.

Kabupaten Padang Pariaman sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah mengulirkan program bantuan sapi potong kepada 64 kelompok tani/ternak yang tersebar di seluruh kecamatan yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman. Program bantuan yang digulirkan tersebut, selain untuk meningkatkan jumlah populasi sapi di Kabupaten Padang Pariaman dan memenuhi kebutuhan daging, juga bertujuan meningkatkan atau memperbaiki kesejahteraan para penerima bantuan. Bantuan yang diberikan berupa sapi bibit dari pemerintah yang berasal dari dana APBD kabupaten dan APBN. Untuk itu sebelum menerima bantuan, penerima bantuan harus memiliki kesiapan yang memenuhi persyaratan dalam menerima bantuan sehingga dalam pelaksanaannya, apa yang diharapkan oleh pemerintah dapat tercapai.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Persepsi dan Kesiapan Penerima Bantuan Pada Program Bantuan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Padang Pariaman”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peternak penerima bantuan mempersepsikan bantuan yang diterima dalam konteks pembangunan peternakan di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaimana kesiapan peternak penerima bantuan dalam menerima program bantuan ternak sapi potong di Kabupaten Padang Pariaman.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk :

1. Mengetahui persepsi peternak penerima bantuan terhadap program bantuan ternak sapi potong di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Mengetahui kesiapan yang dimiliki oleh peternak penerima bantuan dalam menerima bantuan ternak sapi potong di Kabupaten Padang Pariaman.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian yang diperoleh nanti diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi ilmiah yang dapat digunakan oleh pihak terkait untuk :

1. Sebagai masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan program bantuan sapi potong dan mempersiapkan penerima bantuan.
2. Sebagai masukan bagi peternak dalam hal kesiapan yang dibutuhkan sebelum menerima bantuan sapi potong.